

S
R
A
N
N
O
O
R



**POLITIK
OTONOMI
DAERAH**

UNTUK PENGUATAN NKRI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI
PENGANTAR

I
III

BAB I GAGASAN DAN KONSEPSI AKSELERASI OTONOMI DAERAH

- AKSELERASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH, KONSOLIDASI DEMOKRASI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6
- OTONOMI DAERAH SEBAGAI WAHANA PEMERATAAN PEMBANGUNAN, AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRATISASI 11
- PENGUATAN DAERAH DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 16

BAB II PERAN PEMERINTAH DARAH DI BIDANG EKONOMI, PEMERINTAHAN, KEAMANAN DAN PENDIDIKAN

- REFORMA AGRARIA DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH 22
- OTONOMI DAERAH DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA 26
- OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN 30
- PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH 34
- AKSELERASI PERAN PENDIRI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PERBATASAN 40
- OTONOMI DAERAH DAN PENGUATAN PRANATA HANKAM 48

BAB III OTONOMI DAERAH, PENEGAKAN HUKUM, DAN "GOOD GOVERNANCE"

- OPTIMALISASI TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM KERANGKA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT 52
- PEMBANGUNAN DAERAH VS PENEGAKAN HUKUM MENUJU INDONESIA BARU 58

- DINAMIKA PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN KEPALA DAERAH	65
- BAHAN KONFERENSI PERS MENYAMPUT ULANG TAHUN KE-16 HARI OTONOMI DAERAH	71

BAB IV GAGASAN PEMBAHARUAN HUKUM

- RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG DESA	76
- TRANSFER DAERAH GUNA MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN DAERAH	85
- PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PIUTANG DAERAH	96
- RANCANGAN UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)	102
- PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU	108
- DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	112
- RUU TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH	118
- IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH : PROBLEMA, PROSPEK DAN KEBIJAKAN	130
- KEADILAN DAN KESELARASAN DALAM HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH	139
- PERGURUANTINGGI PENCETAK SUMBERDAYA MANUSIA UNGGUL DAN KOMPETITIF	143
- PEMERATAAN PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH SEBAGAI MODAL PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS BAGI INDONESIA MASA DEPAN	146
- POKOK-POKOK PENDAPAT APKASI TENTANG MASALAH 19 RUU TENTANG DAERAH OTONOMI	153
- OTONOMI DAERAH DAN REALISASI HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN	157
- BIODATA RINGKAS	158